



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 355 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 149 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

- 3
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e /

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 149 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.**

Pasal I

**BERISI HAL-HAL YANG AKAN DIUBAH DALAM PERUBAHAN ✓
KEDUA**

Ketentuan angka 1.2 Landasan Hukum BAB I, Tabel T-C 25 BAB IV, Tabel 4.2 BAB IV, Tabel T-C 27 BAB VI dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 149 Seri E Nomor 79) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 35 SERI E NOMOR 34**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 149
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR
149 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB I

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tenga Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 107);
28. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 149 Tahun 2021 tentang rencana Atrategis Kecamatan Bagelen Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 59);

BAB IV

Tabel 4.1 T-C25

Tabel T-C25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bagelen
Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00

Tabel 4.2

Manajemen Resiko Kecamatan Bagelen

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab			Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak
			Urutan	Kode	Pemilik	Urutan	Sumber	C/UC	Urutan	Pihak				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat												
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat												
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terhambatnya Percepatan dan Keyakinan Pelayanan Publik Di Kecamatan Bagelen	RSP1	Camat	Sarana dan Prasarana pelayanan Publik belum terpenuhi secara maksimal	Internal		Belum bisa memenuhi Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Secara Maksimal	Camat/ Masyarakat	2	2	4	Melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi dengan Tim Paten Kecamatan dan OPD terkait
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Keterlambatan Penyelesaian Masalah pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	RSP2	Camat	Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Internal		Belum optimalnya penyelesaian Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa	Camat/ Masyarakat	2	2	4	Penguatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Koordinasi Desa dengan langsung melaksanakan Rakor di desa dan Kecamatan
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keterlambatan Penyelesaian Masalah pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bagelen	RSP3	Camat	Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Internal		Belum optimalnya penyelesaian Masalah pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Camat/ Masyarakat	2	2	4	Penguatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Koordinasi Desa dengan langsung melaksanakan Rakor di desa dan Kecamatan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Keterlambatan Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah	RSP4	Camat	Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah	Internal		Belum optimalnya penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat/ Masyarakat	2	2	4	Penguatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Koordinasi Desa dengan langsung melaksanakan Rakor di desa dan Kecamatan

BAB VI

Tabel 6.1 (TC-27)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bagelen
Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
		UR	BP U	PMG	KEG	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026							
												Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,00	81,43	82,00		83,00		84,00		85,00		86,00		88,00		100				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,00	81,43	82,00	1,888,087,849	83,00	1,904,227,653	84,00	2,217,628,827	85,00	2,277,771,616	86,00	2,287,985,049	100	10,585,410,988					
		7	01	01		PROGRAM PENGUJARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Pelaksanaan Pengujian Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100	100	100	1,737,709,849	100	1,759,866,488	100	1,948,754,107	100	2,018,181,766	100	2,028,549,046	100	9,811,265,909	Kec Bagelen	Kec Bagelen			
		7	01	01	201	Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			7	26,280,000	7	27,204,000	7	38,480,000	7	41,787,000	7	44,181,000	35	197,987,840	Kec Bagelen	Kec Bagelen			
							Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	15	20.070.300,00	15	20.577.330,00							30	40.647.830,000	Kec Bagelen	Kec Bagelen		
		7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							15	21.077.083,00	15	21.719.569	15	22.213.569	75	65.004.201,300	Kec Bagelen	Kec Bagelen		
		7	01	01	201	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1	1.865.200,00	1	2.051.720,00							2	3.816.820,000	Kec Bagelen	Kec Bagelen		
		7	01	01	201	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen							1	2.258.882,00	1	2.482.581	1	2.730.839	3	7.470.312,20	Kec Bagelen	Kec Bagelen		
		7	01	01	201	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1	1.865.200,00	1	2.051.720,00							2	3.816.820,00	Kec Bagelen	Kec Bagelen		
		7	01	01	201	0003	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen							1	2.258.882,00	1	2.482.581	1	2.730.839	3	7.470.312,20	Kec Bagelen	Kec Bagelen		
		7	01	01	201	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1	2.411.200,00	1	2.652.320,00							2	5.083.520,00	Kec Bagelen	Kec Bagelen		
		7	01	01	201	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen							1	2.917.552,00	1	3.208.307	1	3.368.773	3	6.496.832,20	Kec Bagelen	Kec Bagelen		

[illegible]

		7	01	01	206	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			12		14,888,304	12		14,775,834	12		14,888,198	36		44,330,136	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			12		21,199,800	12		23,275,580				24		44,435,180	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			12		23,503,118	12		24,183,428	12		24,779,770	36		72,448,314	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12		8,977,600	12		7,675,360				24		14,652,960	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12		7,742,888	12		7,887,188	12		7,915,904	36		23,545,988	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	06	Penyediaan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			12		1,332,000	12		1,486,200				24		2,797,200	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			12		1,511,720	12		1,872,882	12		1,750,181	36		4,834,783	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			12		8,313,000	12		9,144,300				24		17,457,300	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	0007	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			12		9,258,730	12		9,584,803	12		9,871,083	36		28,884,386	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan														-	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan								3,000,000			3,250,000			9,750,000	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 bulan	12 bulan	12		31,940,000	12		26,000,000				24		56,940,000	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12		26,000,000	12		26,000,000	12		27,500,000	36		77,500,000	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			1			1						2		-	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			1		200,000	1		300,000	1		400,000	3		900,000	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemangku Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Pemangku Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis			7		38,682,000	7		-	7		-	7		18,084,384	7		26,137,410	36		79,828,794	Kee Dageleu	Kee Dageleu
							Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Pemangku Urusan Pemerintah Daerah																								
		7	01	01	207	01	Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1			1		256,822,500				2		#VALUE!	Kee Dageleu	Kee Dageleu						
		7	01	01	207	0001	Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1						1		1		3		-	Kee Dageleu	Kee Dageleu					
		7	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1			1						2		-	Kee Dageleu	Kee Dageleu						

[illegible]

